

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Fitzerad Francis Maisory¹, Zakaria², Fahrudin Pasolo³, Muh Yamin Noch⁴, Yaya Sonjaya⁵

^{1, 2, 3} Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

^{4, 5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

e-mail Korespondensi: zakariahatta15@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Populasi penelitian terdiri atas 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pada 35 OPD di Provinsi Papua. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai variabel yang paling dominan.

Implikasi Penelitian: Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu difokuskan pada penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah.

Kata Kunci: *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan.*

Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel kepada publik, yang berimplikasi pada manajemen di instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2018), laporan keuangan yang andal menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang jujur, dapat dibuktikan, dan netral. Representasi jujur, yaitu ilustrasi data yang akurat dan mewakili transaksi dan kejadian lain yang diharapkan disajikan secara wajar. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang sekaligus menjadi konsolidator.

Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Modo dkk. (2016). Laporan keuangan yang berkualitas bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelaksanaan administrasi keuangan di Provinsi Papua maupun Papua Barat masih belum optimal, meskipun Provinsi Papua mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Namun, sebanyak 51,7 persen kabupaten/kota masih memperoleh opini *disclaimer* dan *adverse* pada tahun 2014 hingga 2018. Dari sisi tata kelola pemerintahan provinsi, masih terdapat beberapa kelemahan. Dijelaskan bahwa kelemahan tata kelola keuangan tersebut merupakan penyebab kedua provinsi tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Salah satu

kelemahan tata kelola keuangan tersebut adalah kepatuhan dalam penyampaian APBD yang masih cenderung rendah. Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam tiga tahun terakhir belum memenuhi kepatuhan terhadap APBD. Fauzia, Kompas.com (2021)

Berdasarkan hasil monitoring center yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Provinsi Papua mendapat nilai 34 persen atau menjadi yang terendah kedua dalam tata kelola keuangan daerah. Sementara itu, Papua Barat mendapat nilai 31 persen, atau yang terendah pertama. "Jadi, Papua Barat 31 persen terendah, dan Papua 34 persen terendah kedua. Nilai tertinggi 91 persen, yakni DKI Jakarta, menunjukkan tata kelola keuangan yang lemah, yang tercermin dari kekosongan regulasi di kedua provinsi tersebut. Tercatat di Papua ada 4 dari 13 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan 5 dari 18 Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang belum ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinulingga (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo) , yang didukung oleh penelitian Ismail dkk. (2021) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Merujuk pada hasil penelaahan pelaksanaan Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tahun 2020, menyimpulkan bahwa: Regulasi terkait penggunaan dana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 belum sepenuhnya memadai, belum didukung sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai dan Provinsi Papua masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keberlanjutan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang mendominasi total pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 64,50 persen pada Tahun Anggaran 2018. dpr.co.id (2020). Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No.59 Tahun 2007)

Faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. SPI adalah proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridzal dkk. (2022) bahwa Sistem Pengendalian Internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Aldino dan Septiano (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tinjauan Pustaka

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Ikatan Akuntan Indonesia 2015) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah penyajian terstruktur atas posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk

memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dibagi menjadi dua, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). SAPP adalah serangkaian prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007, adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dari segi konstruksi sistem akuntansi, pada SAPP terdapat Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sedangkan pada SAPD terdapat Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SA-PPKD) yang dapat dianggap sebagai SA-BUN di pemerintah pusat, serta Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SA-SKPD) yang setara dengan SAI di pemerintah pusat. Adapun konstruksi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pengendalian internal merupakan prosedur, rencana, metode, dan kebijakan yang dibentuk untuk memberikan jaminan atas terciptanya efektivitas dan efisiensi operasional, pengamanan aset, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang, dan lain-lain. Secara umum, pengendalian internal memiliki peran penting dalam terciptanya suasana kondusif di instansi pemerintah karena berperan dalam mengendalikan seluruh kegiatan yang terjadi di instansi atau organisasi. Dengan demikian, jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan yang seharusnya dilakukan, tugas pengendalian internal adalah mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan yang sama.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan (Nurlillah, 2014). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

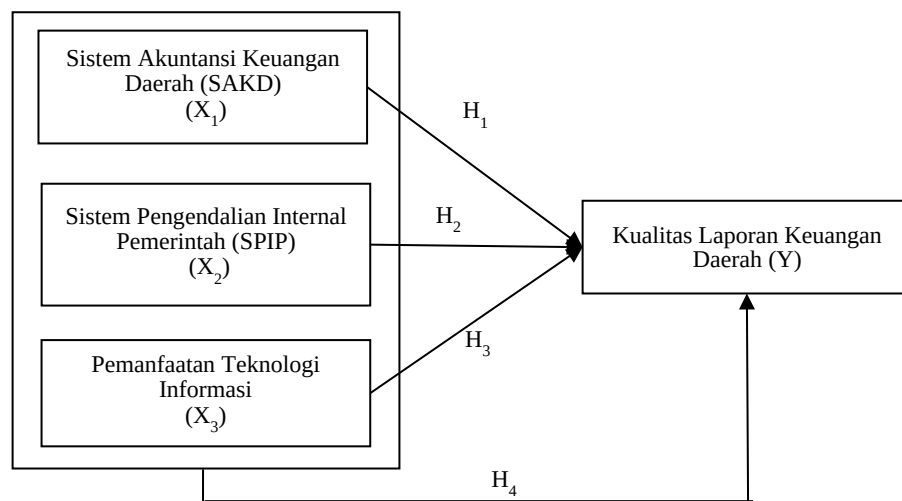
Pemanfaatan teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk memaksimalkan fungsi kemajuan teknologi informasi, di mana pemanfaatan tersebut mencakup pengolahan informasi, pengolahan data, tata kelola manajemen, dan tata kelola kerja secara elektronik. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ini bertujuan agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah. Selain memanfaatkan komputer, teknologi informasi juga mencakup jaringan internet yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah bagi masyarakat umum. Salah satunya yakni dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses situs resmi pemerintah daerah guna memperoleh informasi mengenai profil pemerintah daerah serta kegiatan-kegiatan terbaru yang telah dilaksanakan, dan yang terpenting adalah informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah.

Menurut Widuri (2010), pemanfaatan teknologi informasi mencakup pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, proses kerja secara elektronik, serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri (Yuniati dkk., 2015). Dengan adanya teknologi informasi ini, pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk memperoleh laporan keuangan yang berguna, laporan tersebut harus disiapkan oleh orang-orang yang kompeten di bidang manajemen keuangan dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2008)

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Kerangka konseptual yang diajukan dalam penelitian ini meliputi Sistem Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel independen, serta Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen. sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui pengujian empiris. Penyusunan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta fenomena pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan dukungan sistem akuntansi yang memadai, sistem pengendalian intern yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur yang digunakan dalam proses pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan daerah. Penerapan SAKD yang baik akan menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian Sinulingga (2022) dan Ismail dkk. (2021) menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H₁: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal yang efektif akan meminimalkan kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian Ridzal dkk. (2022) serta Aldino dan Septiano (2021) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pengelolaan data keuangan dilakukan dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Teknologi informasi membantu pemerintah daerah dalam proses pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data keuangan sehingga dapat meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan teori dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas informasi akuntansi dan pelaporan keuangan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil sinergi berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah berfungsi sebagai mekanisme pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan; sistem pengendalian intern pemerintah memastikan keandalan dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi mendukung efisiensi dan akurasi dalam proses pengolahan data keuangan. Apabila ketiga faktor tersebut diterapkan secara optimal, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Populasi penelitian terdiri atas 70 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari 35 OPD, dengan masing-masing OPD diwakili oleh 2 responden yang bertugas sebagai bendahara, operator sistem laporan keuangan, atau petugas verifikasi laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh (saturated sampling), sehingga seluruh anggota populasi dijadikan responden dalam penelitian. Variabel independen yang diteliti meliputi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sedangkan variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan SPSS versi 22.0. Sebelum pengujian hipotesis, data diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Instrumen hasil penelitian analisis deskriptif variabel penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,5630 dengan standar deviasi sebesar 0,08156. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 3,6373 dengan standar deviasi sebesar 0,05674. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,7281 dengan standar deviasi sebesar 0,07620. Variabel terikat menunjukkan bahwa nilai rata-rata Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) sebesar 3,7352 dengan standar deviasi sebesar 0,08240. Deskriptif statistik diperoleh data sesuai dengan variabel yang dianalisis yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Deviasi
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	67	2,27	4,73	3,5630
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	67	2,20	4,90	3,6373
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	67	2,50	5,00	3,7281
Kualitas laporan keuangan daerah (LKPD)	67	2,25	5,00	3,7352
Valid N (listwise)	67	2,27	4,73	3,5630
SAKD	67			

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Sistem Pengendalian internal Pemerintah (X_2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) dan variabel Kualitas laporan keuangan Daerah (Y) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel penelitian memiliki nilai korelasi *product moment* atau nilai r hitung lebih besar dari nilai kritis r tabel atau $R_{\text{Hitung}} > R_{\text{Tabel}}$ dengan $\alpha = 0,05$ atau 5% dan *Corrected Item-Total Correlation* masing-masing indikator $> 0,2423$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan penelitian valid.

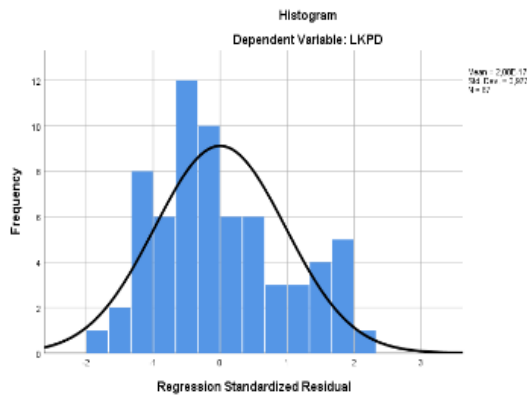
Hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60 (Sugiono, 2017). Hasil analisis uji reliabilitas setiap pertanyaan menggunakan program SPSS versi 26.0 for Windows. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.2. sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

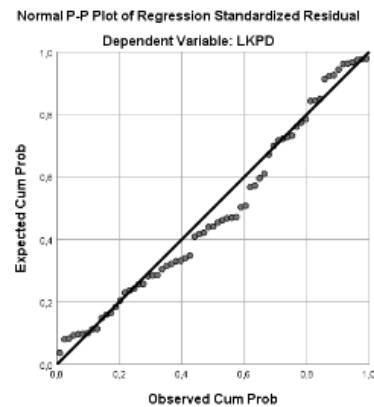
Variabel	No Item	Cronbach's Alpha
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	11	0,805
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	10	0,627
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	8	0,628
Kualitas laporan keuangan daerah (LKPD)	8	0,748

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan model regresi layak digunakan dalam penelitian ini. Pada gambar grafik Normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 1. Histogram Normalitas



Gambar 2. Normal Plot Regresi

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

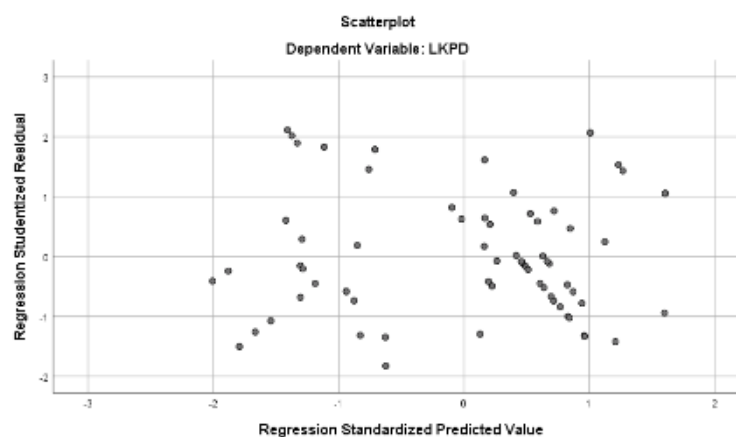
Hasil Uji multikolineritas menunjukkan nilai *tolerance* sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) sebesar 0,694, Sistem pengendalian internal pemerintah (X_2) sebesar 0,668, Pemanfaatan teknologi informasi (X_3) sebesar 0,524 dimana tingkat toleransi dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF Penerapan sistem akuntansi pemerintah (X_1) sebesar 1,442, Sistem pengendalian internal pemerintah (X_2) sebesar 1,497, Pemanfaatan teknologi informasi (X_3) sebesar 1,889, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolineritas pada variabel independent, ebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	,694	1,442
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	,668	1,497
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	,529	1,889

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Hasil grafik scatterplot tidak menunjukkan pola yang jelas dan terlihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dari masing-masing variabel bebas, sehingga tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Jika terjadi pola yang acak atau tersebar, maka tidak ada heteroskedastisitas. Pada gambar grafik *scatterplot* ditunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficients (B) Standar error		T _{hitung}	Sig
(Constant)	,418	,238	1,757	,084
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	,011	,058	,193	,848
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	,706	,050	14,238	,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	,191	,071	2,704	,009

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh model persamaan regresi $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$. Menghasilkan model persamaan regresi berdasarkan hasil analisis yaitu : $Y = 0,418 + 0,011X_1 + 0,706X_2 + 0,191X_3 + e$. Persamaan ini menunjukkan interpretasi sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 0,418 menunjukkan arah positif. Hal ini mengandung makna bahwa kualitas laporan keuangan daerah di lingkungan OPD pemerintahan daerah Provinsi Papua meningkat sebesar 0,418 satuan atau sebesar 41,8% tanpa dipengaruhi oleh variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), sistem pengendalian internal pemerintah (X_2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X_3).

Nilai koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) sebesar 0,011 memiliki arah positif, yang mengandung makna bahwa apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah meningkat satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah OPD Pemerintahan Daerah Provinsi Papua sebesar 0,011 satuan atau sebesar 1,1% dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_2) sebesar 0,706 memiliki arah positif, yang mengandung arti bahwa apabila sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) meningkat sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah OPD Pemerintahan Daerah Provinsi Papua sebesar 0,706 satuan atau sebesar 70,6% dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) sebesar 0,191 memiliki arah positif, yang mengandung arti bahwa apabila variabel pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan daerah di lingkungan OPD Pemerintahan Daerah Provinsi Papua sebesar 0,191 satuan atau sebesar 19,1% dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.16 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Variabel tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,848 > 0,05$ dan perolehan t_{hitung} sebesar 0,193, dengan t_{tabel} 1,66792 atau $0,204 > 1,66792$, serta arah positif. Berdasarkan hasil analisis tersebut, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintahan Daerah Provinsi Papua, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.

Variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_2) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan perolehan T_{hitung} sebesar 14,238 dimana T_{tabel} 1,66792 atau $14,238 > 1,66792$, berdasarkan hasil analisis tersebut maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintah daerah Provinsi Papua variabel sistem pengendalian internal pemerintah merupakan satu-satunya variabel yang signifikan dalam penelitian ini dan merupakan variabel yang paling dominan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis Kedua diterima.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dan perolehan t hitung sebesar 0,009, dengan t tabel 2,704 atau $1,66792 < 2,704$. Berdasarkan hasil analisis tersebut, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap variabel Y , sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Hasil analisis menggunakan program SPSS versi 26.0 for Windows pada Tabel 4.16 menunjukkan nilai F hitung sebesar $126,988 > 2,741574$, sedangkan nilai sig ($p\text{-value}$) sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan nilai (sig) = $0,000 < \alpha$ yang dipersyaratkan (0,05). Dengan demikian, H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), sistem pengendalian internal pemerintah (X_2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X_3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.

Hasil analisis menunjukkan bahwa diketahui nilai Adjusted R^2 sebesar 0,851, hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi pengaruh variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), sistem pengendalian internal pemerintah (X_2), dan pemanfaatan teknologi informasi (X_3) terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan OPD Pemerintahan daerah Provinsi Papua sebesar 85,1% Sedangkan sisanya 14,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti; Kompetensi aparatur pemerintah, lingkungan kerja, fasilitas kerja, kompensasi, Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dan variabel-variabel lain.

Pembahasan.

Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD di Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) belum terlaksana secara optimal. Penerapan SAKD seharusnya dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah belum dapat memberikan kontribusi optimal dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua masih perlu terus meningkatkan kemampuan aparatur di bagian keuangan dalam memahami sistem akuntansi keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangat penting disajikan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), karena laporan keuangan tersebut mampu memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi keuangan daerah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem Akuntansi keuangan daerah merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan, termasuk legislatif, akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan auditor eksternal (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, definisi Sistem Akuntansi Keuangan daerah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SKAD merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia

Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Sistem pengendalian internal pemerintah dalam penelitian ini merupakan satu-satunya variabel yang

paling dominan dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang efektif. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan, yaitu bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan berkualitas.

Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintah yang andal dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan adalah dengan membentuk Standard Operating Procedures (SOP). Menurut Permenpan No. 21 Tahun 2008, SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses secara integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Menurut Rai (2008), sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah penerapan PP No. 60 Tahun 2008 bagi seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan.

Efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah berdampak sedang terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengendalian internal pemerintah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah OPD Provinsi Papua.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan analisis penelitian, pemanfaatan teknologi informasi sudah berjalan secara maksimal sehingga dapat memberikan pengaruh dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi, meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi, dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, akurasi perhitungan, serta penyusunan laporan sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan lebih tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Papua dapat meningkatkan efektivitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, serta meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga masing-masing OPD mampu menyelesaikan dan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan optimalisasi dalam memanfaatkan peran teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik.

Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Papua belum dilakukan secara optimal karena masih terdapat OPD yang melaporkan LKPD terlambat, sehingga sistem informasi keuangan daerah yang digunakan masih belum efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi membantu instansi melaksanakan tugas-tugas dengan lebih mudah dan cepat. Ketersediaan teknologi informasi bagi instansi pemerintahan membuat biaya pengolahan data lebih rendah dan mendukung penyajian pelaporan keuangan yang andal.

Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas keuangan daerah pada masing-masing OPD Pemerintah Provinsi Papua dapat dilakukan melalui konsistensi dan peningkatan pemahaman dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, konsistensi dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah, serta pemberdayaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kegagalan dan kurangnya pemahaman sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan berdampak pada kekeliruan dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, serta ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan. Maka, tujuan sistem pengendalian internal menjadi salah satu solusi dalam melakukan pengecekan, ketelitian, dan keandalan data akuntansi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk menghindari risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan yang dapat diminimalkan. Salah satu bagian dalam sistem akuntansi keuangan daerah adalah untuk menunjang kelancaran kerja dalam menyajikan informasi laporan keuangan dan mempermudah pengawasan, yang ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi yang memadai sehingga penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pendidikan bidang akuntansi: aparatur pemerintah daerah harus tetap berpedoman pada sistem akuntansi keuangan daerah, konsisten dalam melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi secara optimal sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat terlaksana dengan baik dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan yang andal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan lebih ditentukan oleh efektivitas pengendalian internal serta optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan penguatan sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Papua perlu difokuskan pada penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa seluruh unsur pengendalian internal berjalan secara efektif melalui penyusunan SOP yang jelas, pengawasan berkelanjutan, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi perlu terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, peningkatan infrastruktur teknologi, serta pelatihan aparatur dalam penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Meskipun SAKD belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan kompetensi aparatur di bidang akuntansi pemerintahan agar penerapan sistem akuntansi dapat mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke pemerintah daerah lainnya. Kedua, jumlah responden relatif terbatas, yaitu 67 responden yang berasal dari aparatur pengelola keuangan daerah. Ketiga, penelitian hanya menguji tiga variabel independen, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sementara masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan seperti kompetensi aparatur, komitmen organisasi, budaya kerja, kualitas sumber daya manusia, ketepatan waktu pelaporan, dan dukungan manajemen. Keempat, data penelitian diperoleh melalui kuesioner sehingga sangat bergantung pada persepsi subjektif responden.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks pemerintah daerah di Provinsi Papua. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian ke pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi lain agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain seperti kompetensi aparatur, komitmen organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, serta menggunakan pendekatan mediasi atau moderasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim dan Syam Kusufi, “Akuntansi Sektor Publik”, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Arikunto, S. (2017). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
- Artikel papua.tribunnews.com (2022), Delapan Kali Pemprov Papua Raih WTP, Gubernur Lukas: Harus Berdampak pada Masyarakat, Stella Lauw, 10 Juni 2022, <https://papua.tribunnews.com>.
- Artikel Pasific.com (2022), 8 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP, Gubernur Lukas Enembe : Jangan Bikin Laporan, Tapi Rakyat Tidak Merasakan, (Tiara), Kamis 9 Juni 2022 <https://www.pasificpos.com/>
- Binawati (2022), Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klaten), OPTIMAL, Vol. 19, No.1, hal. 19 – 39 ISSN 1693-5888, Maret 2022
- Chariri, & Ghozali, I. (2017). Teori Akuntansi. Semarang : Diponegoro, Penerbit Universitas.
- Fazlurahman, dkk. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening (studi pada BPKA Kota Bandung). Jurnal KRISNA Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 12, No. 2, pp. 250-265. ISSN: 2301-8879. E-ISSN: 2599-1809. Hal. 190-196 Januari 2021.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
- Helmi Prila Aldino dan Renil Septiano (2021), Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, Pengendalian Internal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295, Volume VII No. 2, 2021.

- Ida Ayu Enny Kiranayanti, Ni Made Adi Erawati (2016), Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemahaman Basis Akrua terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, Vol.16.2. hal. 1290-1318, Agustus 2018.
- Ismail dkk. (2021), Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. *Open Jurnal Sistem* ISSN No. 1978-3787 (Cetak) ISSN 2615-3505 Vol.15 No.12 hal 5889-5895, Juli 2021. (Online) <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>
- Kaifah, U., & Tryana, A. L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 26–37.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terbaru. ISBN: 978-979-29-6972-6. Yogyakarta, 2018.
- Maydiyanti, Siska, Putri, Annie Mustika, & Anriva, Della Hilia. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69–78. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1>
- Modo, Sintike Mentari Dkk. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Akuntansi dan Auditing "Good Will": Universitas Sam Ratulangi*. Vol. 7 No. 2 2016
- Mutia Fauzia (2021), "Kelemahan Tata Kelola Keuangan Papua dan Papua Barat" Januari 2021, Kompas.com:
- Noch, M. Y., & Husen, S. (2015). *Metode Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen* (M. B. H. Ibrahim, ed.). Perdana Publishing.
- Nilamsari (2020), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi OPD Kota Semarang, *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, p-ISSN: 2087-2836 and e-ISSN: 2580-9482 Vol.10, No. 2, pp. 85-94, September 2020
- Rama Ardianto (2019), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang), *Jurnal Bina Akuntansi*, Januari 2019, Vol.6 No.1 Hal. 95-136.
- Ridzal (2022), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, *Riset & Jurnal Akuntansi* e-ISSN: 2548-9224, p-ISSN: 2548-7507, Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.882>,
- Sinulingga dkk. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). *Jurnal Manajemen* Volume 8 Nomor 1 (2022) Juni 2022 p – ISSN : 2301-6256, e - ISSN : 2615-1928,
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Therisyantari dan Suaryana (2022), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Informasi dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kinerja Manajerial BPR Tabanan, *E-Jurnal Akuntansi*, e-ISSN 2302-8556, Vol. 32 Hal. 889-900, 26 April 2022. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i04.p05>.

- Tommy Ferdian (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dusun Di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo) Jurnal AKRAB JUARA Desember 2021, Volume 6 Nomor 5 Edisi Halaman 35-48,
- Wijayanti (2021), Analisis Aspek Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Jurnal Aktual, Vol. 6, No. 1, Juli 2021, ISSN: 2337-268x, p.31-39.

Peraturan Perundang-undangan

- , Peraturan Pemerintah. (2004). Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2005.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2010.
- , Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- , Peraturan Pemerintah. (2013). Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- , Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;
- , Peraturan Pemerintah. (2015). Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- , Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.